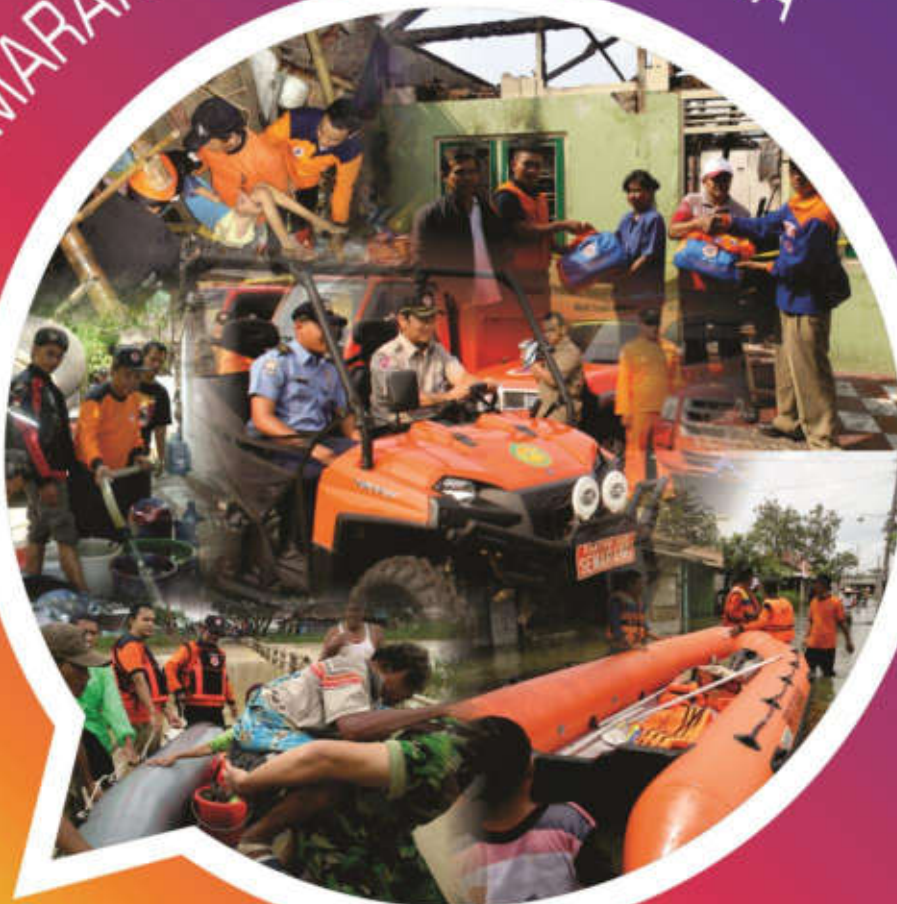




Pemerintah  
Kota Semarang

MENUJU SEMARANG TANGGUH BENCANA



# RENSTRA

RENCANA STRATEGIS TH. 2021-2026



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Brigjend Sudiarto KM.11 ( Komplek Terminal Penggaron ) Semarang



024-6730212 / 08122010051



[www.bpbd.semarangkota.go.id](http://www.bpbd.semarangkota.go.id)



@BPBD\_semarang



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang, atas dasar tersebut maka Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang diharapkan dapat



mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang penanggulangan bencana, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang; dan
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Pengurangan resiko bencana dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang penanggulangan bencana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang disusun dengan sistematika sebagai berikut:



## **BAB I Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

## **BAB II Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## **BAB III Isu Strategis**

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

## **BAB IV Tujuan dan Sasaran**

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang 2021-2026.

## **BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan**

Berisi strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang 2021-2026.

## **BAB VI Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

## **BAB VIII Penutup**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

### **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

### **KOTA SEMARANG**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 39 tahun 2010 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Kota Semarang, tugas pokok dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengurangan resiko bencana yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

##### **2.1.1 Struktur Organisasi**

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara structural. Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang menurut Peraturan Daerah nomor 25 tahun 2011 komposisinya dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.1  
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA SEMARANG





### **2.1.2 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 39 Tahun 10 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

Dengan susunan kepegawaian BPBD sebagaimana yang dikemukakan dalam struktur organisasi yaitu:

1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretaris
  - a. Kasubag Perencanaan dan Evaluasi
  - b. Kasubag Keuangan
  - c. Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - a. Kepala Seksi Pencegahan
  - b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan
4. Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik
  - a. Kepala Seksi Kedaruratan
  - b. Kepala Seksi Logistik
5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  - a. Kepala Seksi Rehabilitasi
  - b. Kepala Seksi Rekonstruksi
6. Jabatan Fungsional

Adapun tugas dari masing-masing komposisi diatas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Pelaksana mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.
- b. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi bidang Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.



Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekteraris mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian;
- 2) Penyusunan rencana program di bidang perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian;
- 3) Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 4) Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 5) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran BPBD;
- 6) Penyusunan laporan kinerja BPBD;
- 7) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Kesekretariatan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 9) Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan kinerja Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 10) Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan Realisasi Anggaran Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 11) Penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- 12) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
- 13) Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepala Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;



- 14) Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam penanggulangan bencana;
- 15) Pengkoordinasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, dan administrasi perjalanan dinas;
- 16) Penyusunan laporan realisasi anggaran Sekretariat;
- 17) Penyusunan laporan kinerja program Sekretariat;
- 18) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan evaluasi;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran kegiatan dibidang perencanaan dan evaluasi;
- c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan evaluasi;
- d) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan BPBD;
- e) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja BPBD;
- f) Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum BPBD;
- g) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi BPBD;
- h) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi dibidang perencanaan dan evaluasi;
- i) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang perencanaan dan evaluasi;
- j) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan dan evaluasi;
- k) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;



- l) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
  - b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang keuangan;
  - c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
  - d) Menyiapkan bahan usulan perencanaan Anggaran BPBD;
  - e) Menyiapkan bahan verifikasi pelaksanaan Anggaran BPBD;
  - f) Menyiapkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran;
  - g) Menyiapkan bahan laporan pertanggung jawaban Keuangan;
  - h) Menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran BPBD;
  - i) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang keuangan;
  - j) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;
  - k) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
  - l) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Keuangan;
  - m) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Keuangan;
  - n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas.
- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  - b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang umum dan kepegawaian;
  - c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;



- d) Menyiapkan bahan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan;
  - e) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sarana prasarana kantor;
  - f) Menyiapkan bahan dan menghimpun Peraturan Perundangan bidang umum dan kepegawaian;
  - g) Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
  - h) Menyiapkan bahan penghimpunan dan pengolahan data dan informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - i) Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - j) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
  - k) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian;
  - l) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian;
  - m) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - n) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;













- g) Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dalam pengerahan sumber daya penanganan bencana
- h) Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang kedaruratan dan logistik;
- i) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang kedaruratan dan logistik;
- j) Pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik;
- k) Pelaksanaan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi kedaruratan dan logistik;
- l) Pelaksanaan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi kedaruratan dan logistik;
- m) Pelaksanaan penyajian tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai dua seksi. Dimana seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1. Seksi Kedaruratan mempunyai tugas .

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kedaruratan;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Kedaruratan;
- c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Kedaruratan;
- d) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- e) Menyiapkan bahan pelaksanaan penentuan status keadaan darurat bencana;
- f) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;



- g) Menyiapkan bahan pemenuhan kebutuhan dasar;
- h) Menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- i) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- j) Menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan tanggap darurat terhadap kejadian bencana;
- k) Menyiapkan bahan peralatan dan pelaksanaan operasional penanggulangan bencana;
- l) Menyiapkan bahan peralatan evakuasi bencana;
- m) Menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyiapan tempat evakuasi;
- n) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Kedaruratan;
- o) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Kedaruratan;
- p) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kedaruratan;
- q) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Kedaruratan;
- r) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Kedaruratan;
- s) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Logistik mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Logistik;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Logistik;
- c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Logistik;
- d) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana;





- g) Pelaksanaan perencanaan pembangunan kembali daerah bencana bersama Instansi terkait.
- h) Pelaksanaan perencanaan koordinasi dengan instansi terkait penetapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana.
- i) Pelaksanaan penghimpunan partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi masyarakat, dunia usaha dan masyarakat;
- j) Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- k) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- l) Pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- m) Pelaksanaan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- n) Pelaksanaan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- o) Pelaksanaan penyajian tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai dua seksi. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1. Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Rehabilitasi;
- c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi;
- d) Menyiapkan bahan pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana;







- q) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Rekonstruksi;
- r) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Rekonstruksi;
- s) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Rekonstruksi;
- t) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

### a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**di Perangkat Daerah Tahun 2021**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat	19		29	6	54
2	D3					
3	S1	18	2			20
4	S2	2	1			3
5	S3					
<b>Jumlah</b>		39	3	29	6	<b>77</b>

Dari jumlah pegawai sebanyak 77 orang ini kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.2.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**di Perangkat Daerah Tahun 2021**

NO	ESELON	GOL / RUANG ( Orang )						STRATA PENDIDIKAN (Orang )						
		IV	III	II	I	NON GOL.	Total	SD	SMP	SMA	D3/ SM	S1	S2	Total
1	II b	1					1						1	1
2	III a						0							0
3	III b	4					4					2	2	4
4	IV a	1	8				9				1	6	2	9
5	Non Eselon		18	15			33			21		12		33
6	Non ASN					35	35			35				35
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>56</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>82</b>

**b. Sarana Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:



**Tabel 2.3.**  
**Aset Tanah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang**

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M <sup>2</sup> )	Tahun Pengadaaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Terminal	1.933.40	2009	Jl Brigjend Sudiarto Km 11	Pakai			Terminal Bus	Pembelian	1.524.762.790	

**Tabel 2.4.**  
**Gedung dan Bangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang**

No. Uru t	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M <sup>2</sup> )	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M <sup>2</sup> )	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja Permanen	Baik	487.5	Jl Brigjend Sudiarto Km 11		HM Pemerintah	Pembelian	1.022.195.000
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	270	Jl Brigjend Sudiarto Km 11		HM Pemerintah	Pembelian	950.494.290
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	2.398	Jl Brigjend Sudiarto Km 11		HM Pemerintah	Pembelian	6.995.951.750
4	Pagar Permanen	Baik	2.398	Jl Brigjend Sudiarto Km 11		HM Pemerintah	Pembelian	98.938.600



## **2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dituntut untuk terus berkarya sesuai peran dan fungsi yang diamanatkan. Dengan demikian, diharapkan BPBD akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja agar terwujud penanggulangan bencana yang efektif dan efisien. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri.

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### **2.3.1. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan yang disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 2.5.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017 - 2021 (Renstra Periode yang Lalu)**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM / NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Resiko Bencana Kota Semarang (berkurang 30% dalam 5 tahun)		IKK		172.96	161.92	150.88	139.84	128.80	124.72	120.75	113.83	115.52		72.11	74.57	75.44	82.61	
2	Cakupan mitigasi penanggulangan bencana		IKK		5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	5.00	10.00	16.00	20.00		100.00	100.00	106.67	100.00	
3	Persentase fasilitasi kelompok jejaring kebencanaan		IKK		41.67	53.03	65.15	81.06	100.00	45.02	64.73	66.67	90.31		108.04	122.06	102.33	111.41	
4	Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS		IKK		20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	0.00	40.00	40.00	80.00		0.00	100.00	66.67	100.00	
5	Persentase cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana		IKK		70.68	78.02	85.36	92.70	100.00	88.00	85.00	90.83	95.00		124.50	108.95	106.41	102.48	
6	Meningkatnya Kapasitas Adaptasi Bencana		IKK		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	
7	pemenuhan sarpras penanggulangan bencana		IKK		100.00					100.00					100.00				
8	Persentase pemenuhan bagi korban bencana		IKK			93.57	95.14	97.57	100.00		100.00	100.00	96.83			106.87	105.11	99.24	
9	Persentase cakupan pemulihan pasca bencana		IKK			88.75	91.50	95.75	100.00		90.00	100.00	99.44			101.41	109.29	103.85	
10	Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	SPM			100.00					100.00					100.00				
11	Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	SPM			100	100				100	100				100.00	100.00			
12	Penanggulangan korban bencana	SPM				100					100					100.00			
13	Pelayanan informasi rawan bencana	SPM					85.36	100	100			85.36	100				100.00	100.00	
14	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	SPM					65.15	100	100			65.15	100				100.00	100.00	
15	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	SPM					95.14	100	100			95.14	100				100.00	100.00	



### **2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



**Tabel 2.6.**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang**

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana	611,877,000	-	-	-	-	729,729,800					119%					-25%	-25%
Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		689,973,000	707,222,000	724,903,000	743,026,000		1,870,704,584	935,817,750	627,951,600			271%	132%	87%	-	2%	-21%
Program penyelenggaraan penanggulangan bencana	963,226,000					943,749,600					98%					-25%	-25%
Program Penanganan Bencana		2,000,000,000	2,050,000,000	2,101,250,000	2,153,781,000		1,166,505,980	1,730,658,590	4,914,062,304			58%	84%	234%	-	2%	58%
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana		1,956,949,000	2,005,873,000	2,056,020,000	2,107,421,000		822,433,700	217,842,000	338,061,000			42%	11%	16%	-	2%	-5%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,775,165,000	3,273,995,800	3,437,653,000	3,609,536,000	3,790,012,000	2,247,417,107	2,056,530,473	1,978,706,544	2,150,904,537		81%	63%	58%	60%	-	8%	-1%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	374,769,000	528,741,200	555,178,000	582,938,000	612,084,000	796,543,250	1,591,058,731	858,797,155	481,279,220		213%	301%	155%	83%	-	14%	2%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		50,000,000					48,168,000					96%				-25%	-25%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	187,364,000	197,967,000	207,865,000	218,259,000	229,171,000	196,048,000	208,160,000	176,874,600	174,475,000		105%	105%	85%	80%	-	5%	-3%

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kota Semarang

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kota Semarang, tantangan kebencanaan dimasa datang yang akan semakin kompleks. Maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

Internal	Eksternal
( + ) Kekuatan	( + ) Peluang
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sruktur Organsasi Lengkap dan Komperhensif.</li> <li>2. Fasilitas dan sarana telekomunikasi yang memadai</li> <li>3. Sinergitas dengan masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.</li> <li>4. Sudah tersedianya data base peta resiko bencana.</li> <li>5. Terbentuknya PRBBK (penguranagn resiko bencana berbasis komunitas) Kelurahan Tangguh.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Perundangan undangan mengenai penanggulangan bencana</li> <li>2. Adanya Organisasi Sosial dan pencinta alam serta pemerhati bencana</li> <li>3. Partisipasi Masyarakat dan Instansi terkait penanggulangan bencana</li> <li>4. Perkembangan teknologi (IT) yang dapat mendukung pengelolaan kebencanaan</li> </ol>

( - ) Kelemahan	( - ) Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana.</li> <li>2. Kurangnya Kompetensi SDM</li> <li>3. Luasnya Cakupan daerah terdampak bencana di 16 Kecamatan dibandingkan ketersediaan jumlah SDM pengelola bencana</li> <li>4. Koordinasi antar lembaga belum terpadu.</li> <li>5. Standarisasi Penanggulangan Bencana dan bantuan perlu ada.</li> <li>6. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang.</li> <li>7. SOP belum lengkap dan belum terdokumentasi</li> <li>8. Sarana prasarana kebencanaan belum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan dataran tinggi di Kota Semarang dan area ROB yang tidak dapat diprediksi untuk kejadian bencananya.</li> <li>2. Belum optimalnya Hardware dan software teknologi kebencanaan</li> <li>3. Minimnya sumber dana dan sarana pendukung operasional</li> <li>4. Kepedulian sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap kebencanaan dan kelestarian lingkungan hidup (ini sama dengan kelemahan no 3).</li> <li>5. Cuaca ektrim diluar perkiraan</li> <li>6. Perilaku oknum masyarakat yang membangun rumah/ bangunan</li> </ol>

memadai	tanpa menghiraukan resiko
9. Pola pengelolaan informasi dan pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan (dipercepat)	bencana
10. Leadership disetiap level belum semuanya kuat dalam menggerakkan aksi	
11. Penerapan Sistem Peringatan Dini belum efektif	

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang selama 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

#### **2.4.1. Tantangan**

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebagai berikut:

1. Terjadinya anomali cuaca sebagai dampak dari pemanasan global (global warming).
2. Belum terpadunya program penanggulangan bencana secara lintas sektor.
3. Belum seragamnya persepsi lintas sektor untuk penanggulangan bencana terpadu.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan penanggulangan bencana seperti kendaraan taktis, rescue, gudang logistik dan alat serta penunjang lainnya.
5. Memasukkan isu kebencanaan pada dokumen RPJMD.

#### **2.4.2. Peluang**

Sedangkan peluang bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan
2. Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan bencana
3. Terus dikembangkannya konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang lebih efektif
4. Kepedulian lintas sektor dan SKPD lainnya untuk mengalokasikan dalam program-program kebencanaan.



### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Badan Penanggulangan Bencana Daerah telaahan, tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis BPBD Kota Semarang.

### 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kota Semarang dalam melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus ditindaklanjuti. Ini berarti, bahwa paradigma manajemen organisasi BPBD Kota Semarang yang mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke preventif dengan karakter *Good Governance*.

BPBD Kota Semarang memiliki peran sentral dalam Penanggulangan Bencana di Kota Semarang, yang diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dimana kekuasaan eksekutif menjadi salah satu potensi pembangunan, BPBD sebagai lembaga Penanggulangan Bencana di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi eksternal dibanding internal, khususnya sebagai koordinator Penanggulangan Bencana baik antar instansi pemerintah maupun antar pemerintah dengan organisasi masyarakat.

Permasalahan lain yang terdapat dalam RPJMD Kota Semarang menjadi perhatian adalah terkait dengan tata ruang wilayah. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang baik menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan wilayah. Masih belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan hal yang menjadi perhatian dalam lima tahun ke depan.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang antara lain :

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Permasalahan**

<b>Permasalahan</b>	<b>Akar Permasalahan</b>
1. Belum optimalnya ketangguhan bencana	1. Masih kurangnya sistem peringatan dini bencana
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang mitigasi bencana	2. Minimnya pengetahuan dan sosialisasi kebencanaan

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dirincikan sebagai berikut:



No	Aspek Kajian	Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Yang Dihadapi
				Internal	Eksternal	
1.	Yuridis	Tersedia Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Dalam Hal Pembentukan Organisasi BPBD dan Penyelenggaraan Bencana Kota Semarang	UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008	Dibutuhkannya landasan hukum bagi aparaturnya dalam penanganan penanggulangan bencana dalam berbagai jenis situasi yang terjadi di lapangan secara lintas sector	Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penanganan bencana secara cepat dan komprehensif	Belum adanya rencana penanggulangan bencana dan rencana kontijensi sesuai jenis bencana
2.	Sumber Daya Manusia	Kurangnya kapasitas dan kuantitas aparaturnya pada BPBD	UU No. 5 Tahun 2014	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan sebagai akibat kurangnya kompetensi dan kuantitas SDM	Penanganan bencana yang sustainable memerlukan SDM yang kompeten & dalam jumlah yang memadai	Aparaturnya yang ada belum memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai
3.	Sumber Dana	Belum optimalnya anggaran untuk penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana	UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 8 huruf d	Belum terlaksananya beberapa rencana kegiatan disebabkan kurangnya anggaran	Penanganan bencana yang komprehensif memerlukan sumber dana yang memadai	Kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi
4.	Sarana dan Prasarana	Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi	UU No. 24 tahun 2007	Kebutuhan akan Sarana prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi	Tuntutan masyarakat akan penanganan bencana yang cepat dan tepat	Kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal



No	Aspek Kajian	Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Yang Dihadapi
				Internal	Eksternal	
5.	Pengurangan risiko bencana (mitigasi bencana)	Belum adanya kesepakatan antar stakeholder untuk melakukan aksi bersama dalam pengurangan resiko bencana	PP No. 21 tahun 2008	Dibutuhkan kesepakatan dengan stakeholder lain dalam melaksanakan langkah pengurangan resiko bencana secara efektif	Belum adanya kesepakatan antar stakeholder untuk melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana	Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Pengurangan Resiko Bencana
6.	Kajian Risiko Bencana	Belum fokusnya penanganan bencana terhadap potensi bencana yang akan terjadi	PP No. 21 tahun 2008	Belum terjalannya langkah – langkah penanggulangan bencana yang terpadu dalam menghadapi potensi bencana	Masyarakat dan dunia usaha belum cukup peduli akan potensi bencana yang mungkin terjadi	Belum adanya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya
7.	Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana belum terlembaga dengan optimal	UU No. 24 tahun 2007, PP No. 21 tahun 2008, Perka BNPB No. 1 tahun 2012, Perka BNPB No. 11 tahun 2014	Belum terjalannya koordinasi yang optimal antara BPBD dengan unsur masyarakat dalam penanganan bencana	Adanya peraturan perundangan yang meminta untuk melembagakan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana	Belum terbentuknya Kelurahan Tangguh Bencana



No	Aspek Kajian	Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Yang Dihadapi
				Internal	Eksternal	
8.	Penanganan tanggap darurat bencana	Penanganan tanggap darurat belum optimal	UU no. 24 tahun 2007 & PP No. 21 tahun 2008	Personil BPBD yang ada tidak mencukupi untuk secara cepat menangani tanggap darurat bencana	Dibutuhkan penanganan tanggap darurat secara cepat dan akurat	Belum optimalnya satgas / tim reaksi cepat penanggulangan bencana
9.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana belum optimal	UU no. 24 tahun 2007 & PP No. 21 tahun 2008	Anggaran dan personil serta kerjasama dengan stakeholder lain belum memadai	Meningkatnya tuntutan akan ganti kerugian dari masyarakat akibat kejadian alam	Belum optimalnya ketersediaan anggaran, personil dan kerjasama



### 3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Walikota yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode.

Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

**“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang Penanggulangan Bencana, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana
2. Meningkatnya upaya penanganan saat bencana
3. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai target meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana

### 3.2. Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan BNPB 2020-2024, sasaran strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.



3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan. Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula indikatornya dalam format indikator kinerja sasaran strategis. Untuk lebih jelasnya indikator kinerja sasaran strategis yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Menjabarkan sasaran yang telah digariskan BNPB, maka Renstra ini akan berusaha menterjemahkannya sasaran di atas sesuai ruang lingkup dan konteks di Kota Semarang yang dirinci dalam rencana program dan indikator yang relevan.

### **3.3. Telaahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan Rencana strategis Badan penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Badan penanggulangan Bencana adalah **Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah dalam Penanggulangan Bencana dan Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.**

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah, Sasaran Badan penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Sasaran yang akan dicapai BPBD Prov Jawa Tengah antara lain:

1. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana
2. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan Masyarakat terdampak bencana
3. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana
5. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah



### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pembengsan wilayah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor ....tahun .....tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang untuk kawasan...xxx dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang meliputi :

##### a. Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan

##### - Rencana pembagian wilayah kota (BWK)

- 1) BWK I dengan wilayah meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan
- 2) BWK II dengan wilayah meliputi Kecamatan Candisari dan Kecamatan Gajah mungkur
- 3) BWK III dengan wilayah meliputi Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Utara
- 4) BWK IV dengan wilayah Kecamatan Genuk
- 5) BWK V dengan wilayah meliputi Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan
- 6) BWK VI dengan wilayah Kecamatan Tembalang
- 7) BWK VII dengan wilayah Kecamatan Banyumanik;
- 8) BWK VIII dengan wilayah Kecamatan Gunungpati;
- 9) BWK IX dengan wilayah Kecamatan Mijen; dan
- 10) BWK X dengan wilayah meliputi Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu.

##### - Rencana pengembangan fungsi utama masing-masing BWK meliputi :

- 1) BWK I dengan pengembangan fungsi utama : perdagangan dan jasa berskala internasional, pusat pemerintah Provinsi, dan pusat pemerintahan Kota



- 2) BWK II dengan pengembangan fungsi utama : pusat pendidikan kepolisian dan pusat olahraga
  - 3) BWK III dengan pengembangan fungsi utama : transportasi laut, transportasi udara, dan kantor pelayanan Pemerintah Provinsi
  - 4) BWK IV dengan pengembangan fungsi utama : industri
  - 5) BWK V dengan pengembangan fungsi utama : perdagangan dan jasa, jasa pertemuan dan pameran
  - 6) BWK VI dengan pengembangan fungsi utama pendidikan tinggi
  - 7) BWK VII dengan pengembangan fungsi utama : perkantoran militer dan perdagangan dan jasa
  - 8) BWK VIII dengan pengembangan fungsi utama : pendidikan tinggi dan paru- paru Kota
  - 9) BWK IX dengan pengembangan fungsi utama : Kantor pelayanan pemerintahan Kota dan paru-paru Kota.
  - 10) BWK X dengan pengembangan fungsi utama : Perdagangan dan jasa dan Industri.
- Rencana penetapan pusat pelayanan meliputi :
- pusat pelayanan kota
    - 1) Pusat pelayanan Kota ditetapkan di BWK I, BWK II, dan BWK III
    - 2) Pusat pelayanan skala kota berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan Kota dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa
    - 3) Pusat kegiatan pemerintahan berupa pusat pelayanan kegiatan pemerintahan yang dilengkapi dengan pengembangan fasilitas, meliputi : kantor Gubernur, kantor Walikota, dan fasilitas kantor pemerintahan pendukung dan pelayanan publik
    - 4) Pusat pelayanan perdagangan dan jasa kota dilengkapi dengan : pusat perbelanjaan skala kota, perkantoran swasta, dan kegiatan jasa lainnya.
  - sub pusat pelayanan kota merupakan pusat BWK yang dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan BWK yang meliputi :
    - 1) sarana perdagangan dan jasa
    - 2) sarana pendidikan
    - 3) sarana kesehatan
    - 4) sarana peribadatan
    - 5) sarana pelayanan umum
  - pusat lingkungan dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan sebagian BWK, meliputi :



- 1) sarana perdagangan
- 2) sarana pendidikan
- 3) sarana kesehatan
- 4) sarana peribadatan
- 5) sarana pelayanan umum

b. Rencana pengembangan sistem jaringan

- 1) Rencana Sistem Jaringan Transportasi meliputi :
  - Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat
  - Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut
  - Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara
- 2) Rencana Pengembangan Sistem jaringan Energi meliputi :
  - Rencana Jaringan Listrik
  - Pengembangan sistem prasarana energi bahan bakar minyak bumi (BBM) dan jaringan pipa gas.
- 3) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi meliputi :
  - rencana sistem telekomunikasi jaringan kabel
  - rencana sistem telekomunikasi nirkabel
- 4) Rencana Pengembangan Sistem jaringan Prasarana Sumber Daya Air meliputi :
  - pengembangan sistem prasarana air baku dan irigasi;
  - penyediaan prasarana air bersih, penggunaan air tanah dan pemanfaatan air hujan; dan pemanfaatan air laut;
  - pengendalian rob dan banjir
- 5) Rencana Pengembangan Sistem Infrastruktur Perkotaan meliputi :
  - rencana sistem persampahan;
  - rencana sistem penyediaan air minum;
  - rencana sistem pengelolaan air limbah;
  - rencana sistem drainase;
  - rencana jaringan jalan pejalan kaki; dan
  - rencana jalur dan ruang evakuasi bencana.
- 6) Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya
  - rencana jaringan jalan sepeda;
  - rencana sistem angkutan umum; dan
  - rencana pengaturan kegiatan sektor informal.

## 2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri atas rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya.

### a. Rencana **Kawasan Lindung**

Kawasan Lindung adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, nilai sejarah dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan. Adapun Kawasan Lindung di Kota Semarang meliputi:

1. ***Kawasan lindung yang melindungi daerah bawahannya***, jenis kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan lindung fisiografis. Luas kawasan lindung fisiografis di Kota Semarang adalah 433 ha, terdapat di Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Semarang Selatan dan Kecamatan Candisari
2. ***Kawasan perlindungan setempat***, terdiri atas : kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk dan embung
3. ***Ruang Terbuka Hijau*** : Ruang terbuka hijau kota direncanakan seluas 11.211 Ha yaitu ruang terbuka hijau privat dikembangkan seluas 10% atau kurang lebih 3.737 Ha dan ruang terbuka hijau publik dikembangkan seluas 20% atau kurang lebih 7.474 Ha.
4. ***Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya***, meliputi :
  - Taman wisata
  - Kawasan cagar budaya
  - Kawasan pantai berhutan bakau/mangrove
  - Kawasan pengungsian satwa
5. ***Kawasan rawan bencana***. Kawasan rawan bencana alam meliputi :
  - Kawasan rawan bencana rob meliputi Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Genuk, Kecamatan Gayamsari, dan Kecamatan Tugu.
  - Kawasan rawan abrasi meliputi di Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Genuk, dan Kecamatan Semarang Barat.



- Kawasan rawan bencana banjir meliputi Kecamatan a. Kecamatan Gajah mungkur; Kecamatan Gayamsari; Kecamatan Ngaliyan; Kecamatan Tugu; Kecamatan Semarang Barat; Kecamatan Semarang Tengah; Kecamatan Semarang Utara; Kecamatan Semarang Timur; Kecamatan Pedurungan; dan Kecamatan Genuk.
- Kawasan rawan bencana rawan gerakan tanah dan longsor. Kawasan rawan bencana rawan gerakan tanah dan longsor terdiri dari :
  - kawasan rawan bencana gerakan tanah meliputi
    - Kecamatan Mijen : Kelurahan Mijen, Jatibarang, Kedungpane, dan Purwosari
    - Kecamatan Gunungpati : Kelurahan Sadeng, Kandri, Pongangan, Nongkosawit, Kalisegoro, Sukorejo, Patemon, dan Pakintelan
    - Kecamatan Banyumanik : Kelurahan Gedawang, Tinjomoyo, Sronдол Kulon, Banyumanik, Pudakpayung, Jabungan
    - Kecamatan Tembalang : Kelurahan Meteseh, Bulusan, Kramas, dan Rowosari
    - Kecamatan Semarang Barat : Kelurahan Manyaran
  - kawasan sesar aktif yang terdapat di :
    - Kecamatan Tembalang : Kelurahan Jangli, Tembalang, Bulusan, dan Kramas.
    - Kecamatan Banyumanik : Kelurahan Sronдол Kulon, Tinjomoyo, Pedalangan, Jabungan, Padangsari, Sumurboto, dan Tinjomoyo
    - Kecamatan Gunungpati : Kelurahan Sumurejo, Mangunsari, Pakintelan, Plalangan, Patemon, Sekaran, Kalisegoro, Sadeng, Pongangan, Kelurahan Ngijo, Cepoko, Kandri, Gunungpati, dan Sukorejo
    - Kecamatan Ngaliyan : Kelurahan Ngaliyan, Kalipancur dan Bambankerep
    - Kecamatan Mijen : Kelurahan Tambangan, Jatirejo, Jatibarang, Wonoplumbon, Ngadirgo, Purwosari, dan Cangkiran.



- Kecamatan Gajahmungkur : Kelurahan Bendan Duwur, Bendan Ngisor, Sampangan, dan Kelurahan Petompon.
- Kecamatan Semarang Barat : Kelurahan Kembangarum, Manyaran, dan Ngemplak Simongan.
- Kecamatan Candisari : Kelurahan Karanganyar Gunung dan Jomblang
- Kecamatan Semarang Selatan : Kelurahan Lamper Kidul, Peterongan dan Wonodri
- Kecamatan Semarang Timur : Kelurahan Karang Kidul, Sarirejo dan Jagalan

o Kawasan rawan bencana longsor yang terdapat di :

- Kecamatan Gajahmungkur meliputi Kelurahan Bendungan, Lempongsari, Bendan Ngisor, Bendan Nduwur, dan Gajahmungkur.
- Kecamatan Candisari : Kelurahan Karanganyar Gunung
- Kecamatan Tembalang : Kelurahan Kramas, Bulusan, Sambiroto, Mangunharjo, Tandang, dan Sendangguwo
- Kecamatan Banyumanik : Kelurahan Padangsari
- Kecamatan Gunungpati : Kelurahan Pongangan, Nongkosawit, Kalisegoro, Sukorejo, Patemon, Pakintelan
- Kecamatan Mijen : Kelurahan Wonolopo, Jatisari, dan Kedungpane.

- Kawasan rawan bencana angin topan : Kecamatan Tembalang, Banyumanik, Gunungpati, dan Mijen.

## **6. Rencana Kawasan Budidaya**

- 1) Kawasan hutan produksi dengan luas kurang lebih 2.171 Ha berupa kawasan hutan produksi tetap
- 2) Kawasan perumahan meliputi :
  - perumahan dengan kepadatan tinggi meliputi perumahan pusat kota yaitu di BWK I, BWK II, BWK III, BWK V
  - perumahan dengan kepadatan sedang meliputi perumahan di BWK IV, BWK VI, BWK VII, BWK X khusus Kecamatan Tugu



- perumahan dengan kepadatan rendah meliputi perumahan di BWK VIII, BWK IX dan BWK X khusus Kecamatan Ngaliyan
- 3) Kawasan perdagangan dan jasa :
    - perdagangan dan jasa skala regional/nasional/internasional
    - perdagangan dan jasa skala kota
    - perdagangan dan jasa skala BWK
    - perdagangan dan jasa skala lingkungan
  - 4) Pengembangan kawasan perkantoran meliputi kawasan perkantoran pemerintah dan swasta
  - 5) Pengembangan kawasan pendidikan berupa rencana pengembangan kawasan
  - 6) pendidikan tinggi dan pendidikan unggulan di wilayah Kota
  - 7) Rencana kawasan industri : Kecamatan Tugu, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Mijen, Kecamatan Semarang Utara, dan Kecamatan Genuk
  - 8) Pengembangan kawasan olah raga
  - 9) Rencana kawasan wisata : wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan
  - 10) Rencana kawasan transportasi
  - 11) Kawasan pertahanan keamanan
  - 12) Rencana kawasan peruntukan pertanian :
    - Kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 2.893 Ha meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Tembalang, Gunungpati, Ngaliyan, Mijen, dan Tugu.
    - Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 2.102 Ha meliputi Kecamatan Tembalang, Gunungpati, Mijen, dan Ngaliyan.
    - Pengembangan fasilitas peternakan
  - 13) Kawasan peruntukan perikanan : perikanan tangkap, perikanan budaya, dan pengolahan
  - 14) Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di Kecamatan Tugu
  - 15) Kawasan pelayanan umum meliputi kawasan fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, serta fasilitas keamanan dan keselamatan.
  - 16) Rencana Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) meliputi RTNH lingkungan bangunan, RTNH skala sub-kawasan dan kawasan, RTNH wilayah kota, dan RTNH fungsi tertentu.

## 7. Rencana Kawasan Strategis

### 1) Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi, meliputi :

- Kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi
- Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas.

### 2) Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan Hidup, meliputi :

- kawasan Waduk Jatibarang
- kawasan reklamasi pantai
- kawasan Banjir Kanal Barat
- kawasan Banjir Kanal Timur

### 3) Kawasan Strategis Sosial Budaya, meliputi :

- Kawasan Masjid Agung Semarang di Kecamatan Semarang Tengah
- Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah di Kecamatan Gayamsari
- Kawasan pendidikan di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Gunungpati
- Kawasan Gedong Batu di Kecamatan Semarang Barat
- Kawasan Kota Lama di Kecamatan Semarang Utara
- Kawasan Kampung Bahari Tambak Lorok.
- Kawasan perbatasan di Kecamatan Genuk, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Ngaliyan-Kecamatan Tugu.

## 3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan BPBD Kota Semarang adalah terkait Meningkatnya ancaman bencana oleh factor alam dan non alam



**Tabel 3.2**  
**Tema Isu KLHS Kota Semarang**

<b>TEMA ISU</b>	<b>ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS</b>
<b>Meningkatnya ancaman bencana oleh factor alam dan non alam</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya ancaman bencana yang dipengaruhi letak topografi wilayah Kota Semarang</li><li>2. Ancaman bencana non alam (pandemi)</li><li>3. Belum adanya persamaan persepsi pengertian dan tindak lanjut yang terencana dan terintegrasi antar institusi dalam rangka penanggulangan bencana</li><li>4. Perubahan cuaca yang tidak bias diprediksi</li></ol>



**Tabel 3.3**  
**Deskripsi Kajian Indikasi Program Prioritas RPJMD Kota Semarang Terhadap Muatan KLHS**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang**

No	Nama Program	Muatan KLHS					
		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan	Kinerja Pelayanan/ Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SD Alam	Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati
1	Program Pengendalian Banjir dan rob dan Program Penguatan Mitigasi Perubahan Iklim	Kerawanan bencana salah satunya disebabkan oleh kegiatan budidaya yang berada pada kemampuan lahan rendah dan memiliki penghambat lahan Rendahnya daya dukung fungsi lindung juga menyebabkan tingginya bencana alam dan iklim	Bencana akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan, korban jiwa, kehilangan materiil, dan berpotensi meningkatkan penyakit. Perubahan iklim akan berdampak meningkatkan wabah penyakit, dan bencana, kekeringan	Kejadian bencana juga disebabkan oleh rendahnya kawasan dengan fungsi jasa ekosistem Pengaturan Perlindungan Pencegahan Bencana (JER 3), JE Pengaturan Tata Air dan Banjir (JER 2), dan JE Pengaturan Iklim (JER 1)	Menurunnya kualitas SDA menjadi salah satu faktor meningkatnya kerawanan bencana dan SDA yang sudah ada akan rusak apabila terjadi kejadian bencana alam	Perubahan iklim akan meningkatkan terjadinya kejadian bencana, kapasitas adaptasi masyarakat yang rendah akan menimbulkan dampak kerugian dan mengganggu sistem kota	Meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam mengancam kelestarian KEHATI



No	Nama Program	Muatan KLHS					
		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan	Kinerja Pelayanan/ Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SD Alam	Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati
2	Program Penyediaan dan pengelolaan air baku	Ancaman sumber air baku meliputi kuantitas dan kualitas air. Daya dukung air perlu dipertimbangkan dengan adanya perubahan tutupan lahan (kuantitas air) dan dari aktivitas kegiatan budidaya dapat mencemari sungai (kualitas air)	Dampak dari sumber air baku yang tidak terpenuhi adalah kekeringan, tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat, pemanfaatan airtanah secara berlebihan akan merusak lingkungan	Ancaman sumber air juga disebabkan rendahnya kawasan dengan Jasa ekosistem Penyedia Air Bersih (JEP 2) dan JE Pengaturan Tata Air dan Banjir (JER 2)	Limbah rumah tangga dan industri yang tidak terkelola dengan baik akan mencemari sungai. Status sungai tercemar berat mengindikasikan bahwa pencemaran melebihi baku mutu di sungai tersebut ditinjau dari parameter TSS, DO, BOD, COD, dan Fosfat	Menurunnya ketersediaan air meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim terutama adanya ancaman musim hujan yang semakin pendek dengan intensitas tinggi dan musim kemarau yang lebih panjang.	Kualitas sungai yang tercemar akan menurunkan biodiversity ekosistem sungai



No	Nama Program	Muatan KLHS					
		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan	Kinerja Pelayanan/ Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SD Alam	Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati
3	Program Pembangunan dan Peningkatan Sarpras Dasar Perkotaan	Alih fungsi lahan akan mengurangi tutupan lahan hijau yang dapat mempengaruhi daya dukung dan daya tampung air	Penurunan tutupan lahan berdampak menurunkan kualitas dan kuantitas air, serta pencemaran tanah (lahan kritis)	Penurunan tutupan lahan menurunkan jasa ekosistem ketersediaan pangan, air bersih, pengaturan tata air dan banjir, pengaturan iklim, dan pencegahan bencana	Penurunan tutupan lahan hijau sebagai akibat alih fungsi lahan akan menurunkan kualitas SDA yaitu lahan kritis sehingga menurunkan kesuburan tanah	Alih fungsi lahan menghasilkan emisi GRK, yang berkontribusi terhadap perubahan iklim yang memiliki dampak meningkatnya wabah penyakit dan kejadian bencana.	Alih fungsi lahan akan berdampak menurunkan biodiversity yang mengakibatkan kepunahan KEHATI baik dari jenis maupun populasi akan terancam
4	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Kualitas udara berkaitan dengan pencemaran SO <sub>2</sub> dan NO <sub>2</sub> . Seiring pengembangan infrastruktur akan	Dampak dari penurunan kualitas udara adalah menurunnya kesehatan masyarakat,	Penurunan kualitas udara akan dipicu rendahnya jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara (JER 8)	Penurunan kualitas udara berhubungan dengan sumber daya alam karena tutupan lahan hijau semakin	Penggunaan kendaraan bermotor akan meningkatkan polutan yang berdampak panjang meningkatkan	Penurunan biodiversity disebabkan alih fungsi lahan. Dampak dari alih fungsi lahan adalah pencemaran udara semakin



No	Nama Program	Muatan KLHS					
		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan	Kinerja Pelayanan/ Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SD Alam	Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati
		meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor yang berdampak negative terhadap kualitas udara	kualitas hidup masyarakat menurun	dan jasa ekosistem pengaturan iklim (JER 1)	berkurang dan tidak terdapat pepohonan yang menetralkan polusi udara	n perubahan iklim sehingga suhu bumi semakin panas	meningkat karena tutupan lahan hijau menurun
5	Program Peningkatan Kualiatas dan Jangkauan Air Limbah	Daya dukung dan tampung air akan semakin menurun akibat kurangnya pengelolaan terhadap limbah industri dan rumah tangga	Pencemaran air disebabkan kurangnya pengelolaan limbah domestik menurunkan pasokan air bersih. Permasalahan sampah yang tidak terkelola	Permasalahan limbah rumah tangga akan menurunkan jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan pengurai limbah (JER 5), pengaturan pemurnian air (JER	Pencemaran air permukaan dan air tanah yang disebabkan oleh pengelolaan limbah domestik (padat dan cair) yang tidak sesuai standar, menurunkan pasokan air bersih	Pertumbuhan penduduk dan permukiman terus berkorelasi terhadap peningkatan limbah domestik (padat dan cair) yang akan terus menghasilkan emisi GRK	Sampah yang tidak terkelola dan permasalahan sanitasi akan menurunkan biodiversity akibat adanya pencemaran air dan tana



No	Nama Program	Muatan KLHS					
		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan	Kinerja Pelayanan/ Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SD Alam	Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati
			akan mencemari tanah, menjadi sumber wabah penyakit, dan pencemaran udara	4), pengaturan tata air dan banjir (JER 2)			
6	Program Pelayanan Angkutan,	Infrastruktur transportasi akan menurunkan daya dukung lingkungan karena perubahan tutupan lahan, daya dukung pangan secara tidak langsung berkurang karena mengalihfungsikan	Pengembangan infrastruktur akan berdampak meningkatkan mobilisasi transportasi sehingga kualitas udara menjadi turun, limpasan air	Pengembangan infrastruktur akan berdampak pada alih fungsi lahan yang akan berpengaruh terhadap jasa ekosistem pangan, pengaturan iklim, keanekaragaman	Dalam pengembangan infrastruktur perlu dipertimbangkan kerawanan bencana di lokasi rencana, kerawanan banjir tinggi akan semakin meningkat	Pengurangan tutupan lahan hijau akibat pengembangan infrastruktur akan menghasilkan emisi GRK dan penggunaan kendaraan bermotor yang semakin	Pengembangan infrastruktur mengancam KEHATI karena alih fungsi lahan



No	Nama Program	Muatan KLHS					
		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan	Kinerja Pelayanan/ Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SD Alam	Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati
		lahan pertanian, daya dukung air juga berkurang karena penurunan resapan	bertambah sehingga semakin rawan banjir, lahan kritis akibat alih fungsi lahan	man hayati, penyedia air bersih, pengaturan tata air dan banjir	kerawanannya dengan menurunnya area resapan air	meningkat akan menyebabkan polusi udara yang berkontribusi pada perubahan iklim	
7	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Daya dukung pangan terdampak apabila produksi pertanian menurun. Selain itu, daya dukung air berperan mendukung daya dukung pangan	Aktivitas pertanian dengan tanaman semusim akan menurunkan kuantitas air dan kualitas air, kesuburan tanah berkurang,	Pertanian akan berdampak pada ekosistem pangan	Penggunaan pestisida dan pupuk anorganik akan berdampak negative terhadap lingkungan yaitu kualitas air semakin menurun dan	Pertanian menghasilkan emisi GRK dari penggunaan pupuk kimia dan perubahan iklim akan mempengaruhi pertanian karena terjadi	Alih fungsi lahan pertanian akan mengancam KEHATI untuk ekosistem sawah



No	Nama Program	Muatan KLHS					
		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan	Kinerja Pelayanan/ Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SD Alam	Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati
		sehingga perlu dipertimbangkan alokasi air untuk lahan pertanian agar produktivitas meningkat dan daya dukung pangan juga meningkat	meningkatkan bencana karena limpasan air meningkat		kesuburan tanah berkurang	pergeseran musim penghujan dan cuaca ekstrim	

Sumber: Laporan KLHS Kota Semarang



Dengan menggunakan hasil penilaian untuk kemudian dideskripsikan dan dirangkum dalam tabel analisis pengaruh kumulatif. Perkiraan pengaruh kumulatif dapat disimpulkan seperti pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Program Prioritas dan Indikator**  
**RPJMD Kota Semarang Terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang**

No	Nama Program	Kesimpulan Analisis Pengaruh Kumulatif
1.	Program Penanggulangan Bencana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dampak dari peningkatan kapasitas mitigasi bencana dapat dilihat dari 2 aspek:<ol style="list-style-type: none"><li><i>a. Mitigasi Struktural.</i></li><li><i>b. Mitigasi Non Struktural / Kultural</i></li></ol></li><li>2. Dampak dari meningkatnya kualitas penanganan pasca bencana.</li><li>3. Dampak dari meningkatnya upaya penanganan saat bencana.</li><li>4. Dampak dari meningkatnya kinerja pelayanan BPBD Kota Semarang.</li></ol>

Dengan melakukan perumusan mitigasi berupa usulan-usulan tambahan untuk meminimalkan atau mengurangi potensi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul dari hasil kajian dan/atau alternatif baru untuk merumuskan Renstra **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang**. Perumusan mitigasi dan/atau alternatif dilakukan berdasarkan kepada hasil tahap pengkajian.

Hasil perumusan mitigasi dan/atau alternatif dalam laporan ini telah melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan. Pelaksanaan konsultasinya bersamaan dengan konsultasi hasil pengkajian. Hal ini dilakukan untuk alasan efisiensi waktu pelaksanaan KLHS yang terbatas. Berdasarkan hasil konsultasi, dapat disampaikan secara ringkas rumusan mitigasi dan/atau alternatif untuk meminimalkan pengaruh/dampak dari pelaksanaan program BPBD Kota Semarang hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Deskripsi Kajian Pengaruh dan Mitigasi**  
**Dampak Indikasi Program Prioritas RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

No	Indikasi Program	Dampak	Rumusan	
			Mitigasi	Alternatif
1	Program Penanggulangan Bencana	<p>1. Dampak dari peningkatan kapasitas mitigasi bencana dapat dilihat dari 2 aspek:</p> <p><b>c. Mitigasi Struktural.</b>            Dengan adanya peningkatan kapasitas mitigasi struktural adalah dapat diwujudkan tata kelola infrastruktur perkotaan sebagai daya dukung kehidupan dan penghidupan masyarakat yang ramah lingkungan serta dapat memberikan rasa aman bagi penduduknya.</p> <p><b>d. Mitigasi Non Struktural / Kultural</b>            Dengan adanya peningkatan kapasitas mitigasi non struktural adalah dapat terwujudnya perubahan budaya/kebiasaan/habit/ di masyarakat yang dipicu oleh pemahaman dan kesadaran akan potensi bencana yang ada dan akan mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat.</p> <p>2. Dampak dari meningkatnya kualitas penanganan pasca bencana.</p> <p>a. Meningkatnya kapasitas penduduk dan kelembagaan yang ada terkait dengan adaptasi</p>	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana</li> <li>• Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</li> <li>• Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan</li> </ul>

No	Indikasi Program	Dampak	Rumusan	
			Mitigasi	Alternatif
		<p>terhadap perubahan iklim dan potensi ancaman bencana yang ada.</p> <p>b. Menjauhkan penduduk/masyarakat yang tinggal di kawasan ancaman bencana.</p> <p>3. Dampak dari meningkatnya upaya penanganan saat bencana.</p> <p>a. Jumlah korban terdampak dapat berkurang.</p> <p>b. Jumlah kerugian harta benda pada penduduk terdampak dapat dikurangi.</p> <p>c. Jumlah korban terdampak secara psikologis dapat dikurangi.</p> <p>4. Dampak dari meningkatnya kinerja pelayanan BPBD Kota Semarang.</p> <p>o Meningkatnya capaian target pelaksanaan program pengurangan resiko bencana di Kota Semarang</p>		

Sumber: Laporan KLHS Kota Semarang



Tabel 3.5  
Tabel Deskripsi Kajian Pengaruh dan Mitigasi  
Dampak Indikasi Program Prioritas RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Indikasi Program	Dampak	KLHS Renstra SKPD	Rekomendasi
1	Meningkatkan Kapasitas mitigasi penanggulangan bencana	<p>Dampak dari peningkatan kapasitas mitigasi bencana dapat dilihat dari 2 aspek:</p> <p><b>a. Mitigasi Struktural.</b> Dengan adanya peningkatan kapasitas mitigasi struktural adalah dapat diwujudkan tata kelola infrastruktur perkotaan sebagai daya dukung kehidupan dan penghidupan masyarakat yang ramah lingkungan serta dapat memberikan rasa aman bagi penduduknya.</p> <p><b>b. Mitigasi Non Struktural / Kultural</b> Dengan adanya peningkatan kapasitas mitigasi non struktural adalah dapat terwujudnya perubahan budaya/kebiasaan/habit di masyarakat yang dipicu oleh pemahaman dan kesadaran akan potensi bencana yang ada dan akan mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat.</p>	Kegiatan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"><li>o Mewujudkan tata kelola infrastruktur perkotaan sebagai daya dukung kehidupan dan penghidupan masyarakat yang ramah lingkungan serta dapat memberikan rasa aman bagi penduduknya.</li><li>o Meujudkan terwujudnya perubahan budaya/kebiasaan/habit di masyarakat yang dipicu oleh pemahaman dan kesadaran akan potensi bencana yang ada dan akan mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat.</li></ul>



No	Indikasi Program	Dampak	KLHS Renstra SKPD	Rekomendasi
2	Meningkatkan kualitas penanganan pasca bencana	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Meningkatnya kapasitas penduduk dan kelembagaan yang ada terkait dengan adaptasi terhadap perubahan iklim dan potensi ancaman bencana yang ada.</li><li>○ Menjauhkan penduduk/masyarakat yang tinggal di kawasan ancaman bencana.</li></ul>	Kelurahan/Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Daerah rawan bencana yang didukung oleh EWS</li><li>○ Peningkatan adaptasi pemulihan pasca bencana</li></ul>
3	Meningkatkan upaya penanganan saat bencana	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Jumlah korban terdampak dapat berkurang.</li><li>b. Jumlah kerugian harta benda pada penduduk terdampak dapat dikurangi. Jumlah korban terdampak secara psikologis dapat dikurangi.</li></ol>	Kelurahan/Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Sarana prasarana kesiapsiagaan bencana</li><li>○ Pemenuhan kebutuhan bagi korban bencana</li></ul>
4	Meningkatkan kinerja pelayanan BPBD Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Meningkatnya capaian target pelaksanaan program pengurangan resiko bencana di Kota Semarang</li></ul>	Peningkatan SDM Aparatur BPBD Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</li></ul>

Sumber: Laporan KLHS Kota Semarang



### Matrik Perkembangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pencapaian SDGs Kota Semarang Tahun 2020-2021

No	Program /Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Kinerja		Total Anggaran Tahun 2018-2023 (Sesuai Dok RAD)	Anggaran				Permasalahan yang Dihadapi	Solusi Inovatif lain yang dapat mendukung pencapaian kinerja
				2021			2020		2021			
				Target (Sesuai Dok RAD)	Realisasi (Semester 1)		Target (Sesuai DPA OPD)	Realisasi (Sesuai LRA OPD)	Target (Sesuai DPA OPD)	Realisasi (Semester 1)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>Tujuan 1 : Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun</b>												
<b>Target 3 : Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana</b>												
<b>Indikator 3.1. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang</b>												
	<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>Persentase pemenuhan bagi korban bencana</b>	<b>93.57</b>	<b>94.93</b>		<b>10,000,000,000</b>	<b>498825200</b>	<b>4615949554</b>				
	Penanggulangan Dan Evakuasi Korban Bencana	Penanganan bencana oleh tim reaksi cepat dan tim kaji	%	100	25	10,000,000,000	984262000	881863000	1,347,300,972	305,344,002		
<b>Indikator 3.2. Kelurahan Siaga Bencana (renja)</b>												
	<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b>	<b>Persentase fasilitasi kelompok jejaring kebencanaan</b>	<b>53.03</b>	<b>58.23</b>		<b>3,290,000,000</b>	<b>680145000</b>	<b>601333600</b>				



No	Program /Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Kinerja		Total Anggaran Tahun 2018-2023 (Sesuai Dok RAD)	Anggaran				Permasalahan yang Dihadapi	Solusi Inovatif lain yang dapat mendukung pencapaian kinerja
				2021			2020		2021			
				Target (Sesuai Dok RAD)	Realisasi (Semester 1)		Target (Sesuai DPA OPD)	Realisasi (Sesuai LRA OPD)	Target (Sesuai DPA OPD)	Realisasi (Semester 1)		
	Kegiatan Kelurahan Siaga Bencana	Pembentukan Kelurahan Siaga Bencana Di Kota Semarang	%	100.00	0.00	63,000,000	124285000	117575000				
<b>Indikator 3.3. Kelurahan Tangguh Bencana (renja)</b>												
<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b>						<b>680145000</b>	<b>601333600</b>					
	Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)	Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) dan pembentukan sekolah madrasah aman bencana (SMAB)	Sekolah dan kelurahan	100	0	57,400,000	75230000	59470000				
<b>Indikator 3.4. Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.</b>												
	<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b>	<i>Persentase tingkat waktu tanggap kebakaran</i>	%	<b>87.23</b>		<b>3,435,000,000</b>						
	Peningkatan Sumber Daya Manusia KSB	Pelatihan Kesiapan Bencana di Kelurahan Siaga Bencana yang terbentuk	kelurahan	100	0	3,435,000,000	36490000	3820000	436,496,294	70,779,800		
<b>Indikator 3.5. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.</b>												



No	Program /Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Kinerja		Total Anggaran Tahun 2018-2023 (Sesuai Dok RAD)	Anggaran				Permasalahan yang Dihadapi	Solusi Inovatif lain yang dapat mendukung pencapaian kinerja
				2021			2020		2021			
				Target (Sesuai Dok RAD)	Realisasi (Semester 1)		Target (Sesuai DPA OPD)	Realisasi (Sesuai LRA OPD)	Target (Sesuai DPA OPD)	Realisasi (Semester 1)		
<b>Indikator 3.6. Persentase pemenuhan bagi korban bencana</b>												
	<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>Persentase pemenuhan bagi korban bencana</b>	<b>93.57</b>	<b>94.93</b>		<b>10,000,000,000</b>	<b>4988252000</b>	<b>4615949554</b>				
	Penanggulangan Dan Evakuasi Korban Bencana	Penanganan bencana oleh tim reaksi cepat dan tim kaji	%	100	25	10,000,000,000	984262000	881863000				
<b>Indikator 3.7. Persentase cakupan pemulihan pasca bencana</b>												
	<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana</b>		<b>%</b>	<b>89.65</b>		<b>9,780,000,000</b>	<b>395066000</b>	<b>326685000</b>				
	Pemulihan Kondisi Psikologis Akibat Bencana	Sosialisasi pemulihan psikologis pasca bencana di Kota Semarang	%	100		9,780,000,000	-	-				
<b>Indikator 3.8. Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)</b>												
<b>Indikator 3.9. Indeks Resiko Bencana</b>												
<b>Indikator 3.10. Jumlah kerugian bencana</b>												
	<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana</b>		<b>%</b>	<b>89.65</b>		<b>9,780,000,000</b>	<b>395066000</b>	<b>326685000</b>				





No	Program /Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Kinerja		Total Anggaran Tahun 2018-2023 (Sesuai Dok RAD)	Anggaran				Permasalahan yang Dihadapi	Solusi Inovatif lain yang dapat mendukung pencapaian kinerja
				2021			2020		2021			
				Target (Sesuai Dok RAD)	Realisasi (Semester 1)		Target (Sesuai DPA OPD)	Realisasi (Sesuai LRA OPD)	Target (Sesuai DPA OPD)	Realisasi (Semester 1)		
	Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Jumlah dokumen RPB		100	0		145530000	144526000	87,839,000	0		
<b>Indikator SDGs 11.5.1 (b) : Kelurahan Siaga Bencana/ Kelurahan Tangguh Bencana</b>												
<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b>												
	Kelurahan Siaga Bencana	Pembentukan Kelurahan Siaga Bencana Di Kota Semarang	Sekolah / Kelurahan	100	0	22,500,000	124285000	117575000				
<b>Indikator SDGs 11.5.1 (c) : Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS</b>												
<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b>												
	Peringatan dini bencana (EWS)	Penyediaan Early Warning System dan pemeliharaan	unit	100	0	67,170,000	245520000	245010000	408,789,740	31,133,100		
<b>Indikator SDGs 11.5.2 (a) JUmlah kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana</b>												
<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana</b>												
	Eventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Infrastruktur	Identifikasi data kerusakan dan kerugian infrastruktur terdampak bencana yang terinventarisir	%	100		11,785,714	-	-				







No	Program /Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Kinerja		Total Anggaran Tahun 2018-2023 (Sesuai Dok RAD)	Anggaran				Permasalahan yang Dihadapi	Solusi Inovatif lain yang dapat mendukung pencapaian kinerja
				2021			2020		2021			
				Target (Sesuai Dok RAD)	Realisasi (Semester 1)		Target (Sesuai DPA OPD)	Realisasi (Sesuai LRA OPD)	Target (Sesuai DPA OPD)	Realisasi (Semester 1)		
	<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>Persentase pemenuhan bagi korban bencana</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>10,000,000,000</b>						
	Penanggulangan Dan Evakuasi Korban Bencana	Penanganan bencana oleh tim reaksi cepat dan tim kaji	kejadian	20		300,000,000	984262000	881863000	113455389	0		
	Pemulihan kondisi psikologis akibat bencana	Sosialisasi pemulihan psikologis pasca bencana	kegiatan	20		200,000,000	-	-				
	Kegiatan : Rekonsiliasi dan resolusi konflik	Sosialisasi rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial	kegiatan	5		90,000,000	-	-				
	Kegiatan : fasilitasi pemberdayaan kehidupan sosial ekonomi dampak Bencana	Pemberdayaan kehidupan sosial ekonomi Pasca bencana	orang	50		500,000,000	86708000	81680000				
	Kegiatan : Pelatihan kajian kebutuhan pasca bencana	Peningkatan kemampuan dalam mengkaji kebutuhan pasca bencana	orang	5		375,000,000	10210000	9960000				



No	Program /Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Kinerja		Total Anggaran Tahun 2018-2023 (Sesuai Dok RAD)	Anggaran				Permasalahan yang Dihadapi	Solusi Inovatif lain yang dapat mendukung pencapaian kinerja
				2021			2020		2021			
				Target (Sesuai Dok RAD)	Realisasi (Semester 1)		Target (Sesuai DPA OPD)	Realisasi (Sesuai LRA OPD)	Target (Sesuai DPA OPD)	Realisasi (Semester 1)		
	Kegiatan : Penanganan Pengungsi	Koordinasi terhadap masyarakat tentang pemulihan pasca bencana melalui penanganan pengungsi	kegiatan	20		625,000,000	-	-				
	Kegiatan Pengelolaan bantuan korban bencana	Bantuan air bersih dan pendampingan bantuan sosial	kegiatan	20		1,500,000,000	68007000	17685000				



## IDENTIFIKASI DATA INDIKATOR SDGS KOTA SEMARANG TAHUN 2018-2030

Kode	Indikator SDG's Nasional	Indikator SDG's Kota Semarang	Satuan	Kinerja dan Status Pencapaian Target TPB/SDGs									Permasalahan yang Dihadapi	Upaya Penanganan dan Inovasi Pencapaian Target
				2020				2021	2020 Terhadap 2021					
				Realisasi	Target	Kinerja	Status	Realisasi (Semester 1)	Target	Kinerja	Status			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun</b>														
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	per 100.000 orang	12888	12888	100	ST		12888	100	ST			
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Kelurahan Siaga Bencana (renja)	%	8.00	8.00	100	ST		8.00	100	ST			
		Kelurahan Tangguh Bencana (renja)	%	8.00	8.00	100	ST		8.00	100	ST			
		Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	%	8.00	8.00	100	ST		8.00	100	ST			



1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Persentase pemenuhan bagi korban bencana	%	96.83	97.57	99.24	<b>ST</b>		97.57	99.24	<b>ST</b>		
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Persentase cakupan pemulihan pasca bencana	%	99.44	95.75	103.85	<b>ST</b>		100	99.44	<b>ST</b>		
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Sekolah Aman Bencana		5	10	50	<b>SR</b>		10	50	<b>SR</b>		
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Indeks Resiko Bencana		113.83	139.84	118.60	<b>ST</b>		128.8	111.62	<b>ST</b>		
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Jumlah kerugian bencana	Rp (Milyar)	259350000	259350000	100	<b>ST</b>		259350000	100	<b>ST</b>		
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB.			259350000	259350000	100	<b>ST</b>		259350000	100	<b>ST</b>		
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah.	dok	1	1	100	<b>ST</b>		1	100	<b>ST</b>		
1.5.4*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana												
<b>Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan</b>													



11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	orang	12888	12888	100	ST		12888	100	ST			
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Indeks Resiko Bencana	indeks	113.83	139.84	118.60	ST		128.8	111.62	ST			
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	- Kelurahan Siaga Bencana (renja) - Kelurahan Tangguh Bencana (renja)	%	8.00	8.00	100	ST		8.00	100	ST			
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS	%	113.83	139.84	81.40	Tinggi		100	113.83	ST			
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB													
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp (Milyar)	259350000	259350000	100	ST		259350000	100	ST			
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	dok	1	1	100	ST		1	100	ST			



11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	dok	1	1	100	ST		1	100	ST		
<b>Tujuan 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya</b>													
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang			12888	12888	100	ST		12888	100	ST		
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	doku men	1	1	100	ST		1	100	ST		
13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030												
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	orang	12888	12888	100	ST		12888	100	ST		
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana.												
13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications.												



### **3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang**

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, telaahan Daerah Nomot 6 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas mitigasi penanggulangan bencana
2. Meningkatkan kualitas penanganan pasca bencana
3. Meningkatkan upaya penanganan saat bencana
4. Meningkatkan kinerja pelayanan BPBD Kota Semarang



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan arahan dari Bappeda Kota Semarang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah .

### 1.5 Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi bidang pengurangan resiko bencana. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta berdasarkan pada isu-isu analisis strategis. Tujuan yang ditetapkan memiliki keterkaitan dengan tujuan dalam RPJMD dan tujuan Renstra BPBD adalah sebagai berikut:

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah sebagai berikut :





## BAB V

# STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### 1.6 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprensif* tentang bagaimana Badan Penanggulangan mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

#### 4.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dijelaskan sebagai berikut.



1. Meningkatkan kapasitas mitigasi penanggulangan bencana
2. Meningkatkan kualitas penanganan pasca bencana
3. Meningkatkan upaya penanganan saat bencana
4. Meningkatkan kinerja pelayanan BPBD Kota Semarang

#### **4.2.2. Kebijakan**

kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



**Tabel 5.1.**  
**Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026**

Strategi	Arah Kebijakan	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
Pengurangan Resiko bencana berbasis Komunitas	Difokuskan pada kelurahan yang rawan bencana	√	√	√	√	√
Pelayanan Informasi di daerah rawan bencana	Dokumen KRB, RPB dan Rencana Kontigensi Bencana di Kota Semarang	√	√	√	√	√
	Pengembangan Early Warning Sistem ( EWS)	√	√	√	√	√
Peningkatan upaya penanganan pasca bencana	Kajian Rehabilitasi dan Rekonstruksi	√	√	√	√	√
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah dampak bencana	√	√	√	√	√
Pemberian bantuan dan penyelamatan serta evakuasi korban bencana secara cepat dan tepat.	Respon time penanganan bencana	√	√	√	√	√
	Pembentukan Forum relawan di daerah rawan bencana	√	√	√	√	√
Peningkatan kapasitas kelembagaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia	√	√	√	√	√
	Peningkatan Sarana Prasarana perkantoran	√	√	√	√	√
	Peningkatan kinerja administrasi da pelaporan keuangan	√	√	√	√	√

**Tabel 5.2.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>VISI (RPJMD)</b>	: <b>Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika</b>		
<b>MISI (RPJMD)</b>	: <b>Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana	Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana	Pengurangan Resiko bencana berbasis Komunitas	Difokuskan pada kelurahan yang rawan bencana
		Pelayanan Informasi di daerah rawan bencana	Dokumen KRB, RPB dan Rencana Kontigensi Bencana di Kota Semarang
			Pengembangan Early Warning Sistem ( EWS)
		Peningkatan upaya penanganan pasca bencana	Kajian Rehabilitasi dan Rekonstruksi
			Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah dampak bencana
	Meningkatnya upaya penanganan saat bencana	Pemberian bantuan dan penyelamatan serta evakuasi korban bencana secara cepat dan tepat.	Respon time penanganan bencana
			Pembentukan Forum relawan di daerah rawan bencana
			Peningkatan Sumber Daya Manusia
	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Peningkatan kapasitas kelembagaan	Peningkatan Sarana Prasarana perkantoran
			Peningkatan kinerja administrasi dan pelaporan keuangan



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

#### 5.1. Rencana Program dan Kegiatan BPBD Kota Semarang

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang 2021 - 2026.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang antara terdapat pada lampiran Tabel 7.1.



Tabel 7.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana		<b>Penurunan nilai Indeks Resiko Bencana Kota Semarang</b>				Nilai	11,552	113	14,272,198,000	111	14,467,037,000	109	16,045,437,000	107	17,855,014,000	105	25,157,497,000	
	Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal					-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Meningkatnya upaya penanganan saat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP					100	100	9,536,412,000	100	9,944,797,000	100	10,255,741,000	100	10,703,088,000	100	11,130,920,000	
	Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					100	100	4,735,786,000	100	4,522,240,000	100	5,789,696,000	100	7,151,926,000	100	14,026,577,000	
			<b>1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>		<b>Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana</b>		%	7	20	4,735,786,000	13	4,522,240,000	20	5,789,696,000	20	7,151,926,000	27	14,026,577,000
			1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi	orang	-	500	535,786,000	500	562,240,000	500	589,696,000	500	676,926,000	500	926,577,000	
			1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen KRB	Dokumen	1	1	160,786,000	1	187,240,000	1	204,696,000	1	251,926,000	1	376,577,000	
			1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Pusat Data Informasi Kebencanaan ( PUSDATIN )	Dokumen	-	12	375,000,000	12	375,000,000	12	385,000,000	12	425,000,000	12	550,000,000	
			1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana ( RPB ) Kota Semarang , dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan	Dokumen	-	4	2,150,000,000	3	1,845,000,000	4	2,475,000,000	3	3,350,000,000	6	8,100,000,000	
			1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ( RPB ) Kota Semarang	Dokumen	1	1	200,000,000	-	-	-	-	-	-	1	500,000,000	
			1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Gladi lapang kebencanaan	orang	-	100	75,000,000	300	225,000,000	300	250,000,000	200	200,000,000	600	600,000,000	
					pengembangan dan pelatihan kebencanaan berbasis komunitas	orang	-	200	200,000,000	400	450,000,000	300	340,000,000	300	350,000,000	300	500,000,000	
					Pengurangan Resiko bencana inklucif disabilitas	orang	-	100	50,000,000	200	100,000,000	100	85,000,000	100	125,000,000	100	150,000,000	
			1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana kebencanaan	jenis	5	5	75,000,000	5	75,000,000	5	100,000,000	5	250,000,000	5	500,000,000	
			1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Early Warning Sistem	titik	7	3	300,000,000	2	220,000,000	3	350,000,000	3	375,000,000	4	1,000,000,000	
			1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana ( KATANA )	Kelurahan	26	8	500,000,000	2	125,000,000	3	250,000,000	11	600,000,000	12	1,000,000,000	
					Pembentukan Sekolah Maderasah Aman Bencana ( SMAB )	sekolah	16	10	200,000,000	2	50,000,000	5	125,000,000	13	350,000,000	15	750,000,000	
			1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Pendampingan Bantuan Sosial	Dokumen	-	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	75,000,000	12	100,000,000	
					Penanganan Rehab/Rekon Pasca Bencana	persen	100	100	400,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	650,000,000	100	1,500,000,000	
			1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan dan Pengembangan TRC Kota Semarang	orang	-	200	100,000,000	100	50,000,000	200	125,000,000	500	375,000,000	500	500,000,000	
			1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Penyusunan Rencana Kontijensi	dokumen	-	-	-	-	-	1	300,000,000	-	-	1	1,000,000,000	
			1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	Dokumen	-	12	1,800,000,000	12	1,950,000,000	12	2,350,000,000	12	2,550,000,000	12	4,000,000,000	
			1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi ( PUSDALOPS )	Dokumen	-	12	1,500,000,000	12	1,650,000,000	12	1,850,000,000	12	2,050,000,000	12	3,000,000,000	
			1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya evakuasi dan Bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana	persen	100	100	300,000,000	100	300,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	1,000,000,000	
			1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasna dan Monev kebencanaan	orang	-	300	250,000,000	100	165,000,000	200	375,000,000	400	575,000,000	500	1,000,000,000	
			1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kelembagaan Kebencanaan	orang	-	300	150,000,000	100	65,000,000	200	125,000,000	400	300,000,000	500	500,000,000	
			1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Monitoring dan Evaluasi kegiatan kebencanaan	Dokumen	-	12	100,000,000	12	100,000,000	12	250,000,000	12	275,000,000	12	500,000,000	
		<b>X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD</b>		%		<b>9,536,412,000</b>		<b>9,944,797,000</b>		<b>10,255,741,000</b>		<b>10,703,088,000</b>		<b>11,130,920,000</b>		
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Manusia	persen	100	100	35,000,000	100	57,000,000	100	37,000,000	100	38,000,000	100	39,000,000		
		X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan lapangan beserta atribut dan kelengkapannya	orang	50	50	25,000,000	50	27,000,000	50	27,000,000	50	28,000,000	50	29,000,000		
		X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	kegiatan	-	2	5,000,000	1	25,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	2	5,000,000		
		X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya pelatihan dan pendidikan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	kegiatan	-	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000		
				Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	%	100	100	1,997,325,000	100	2,178,957,500	100	2,135,309,375	100	2,180,434,710	100	2,180,984,625		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	persen	100	100	555,325,000	100	633,957,500	100	589,825,000	100	587,325,000	100	555,484,625		
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	jenis	10	10	5,325,000	5	5,325,000	5	5,325,000	5	5,325,000	5	5,325,000		
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	jenis	3	3	30,000,000	3	40,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000		
		X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan	jenis	5	5	50,000,000	5	60,000,000	5	55,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000		
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	10	10	25,000,000	10	27,000,000	10	28,000,000	10	28,000,000	10	29,000,000		
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	lembar	1,000	1,000	35,000,000	1,000	37,500,000	1,000	37,500,000	1,000	39,000,000	1,000	40,000,000		
		X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang berkunjung	orang	1,000	1,000	55,000,000	1,000	65,000,000	1,000	65,000,000	1,000	65,000,000	1,000	67,000,000		
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	kegiatan	100	100	175,000,000	100	195,000,000	100	195,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000		
		X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	jenis	5	5	180,000,000	5	204,132,500	5	175,000,000	5	170,000,000	5	134,159,625		



X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	persen	100	100	678,000,000	100	730,000,000	100	730,484,375	100	748,500,000	100	765,500,000
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat OPD yang telah terkirim	persen	100	100	3,000,000	100	3,000,000	100	3,484,375	100	3,500,000	100	3,500,000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	persen	100	100	265,000,000	100	282,000,000	100	282,000,000	100	285,000,000	100	287,000,000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keamanan dan kebersihan kantor terpenuhi	persen	100	100	410,000,000	100	445,000,000	100	445,000,000	100	460,000,000	100	475,000,000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	persen	100	100	764,000,000	100	815,000,000	100	815,000,000	100	844,609,710	100	860,000,000
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	10	10	310,000,000	10	330,000,000	10	330,000,000	10	345,000,000	10	350,000,000
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	10	10	300,000,000	10	325,000,000	10	325,000,000	10	338,000,000	10	350,000,000
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	unit	1	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	5,000,000	1	4,000,000
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	unit	10	10	75,000,000	10	78,000,000	10	78,000,000	10	78,609,710	10	78,000,000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor	gedung	1	1	75,000,000	1	78,000,000	1	78,000,000	1	78,000,000	1	78,000,000
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	%	100	100	6,000,000	100	8,000,000	100	6,000,000	100	6,000,000	100	14,500,000
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	6,000,000	100	8,000,000	100	6,000,000	100	6,000,000	100	14,500,000
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja dan Renstra	dokumen	1	1	1,500,000	1	2,000,000	1	1,500,000	1	1,500,000	2	10,000,000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	dokumen	2	2	1,500,000	2	2,000,000	2	1,500,000	2	1,500,000	2	1,500,000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA	dokumen	2	2	1,500,000	2	2,000,000	2	1,500,000	2	1,500,000	2	1,500,000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi OPD	dokumen	1	1	1,500,000	1	2,000,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	%	100	100	7,498,087,000	100	7,700,839,500	100	8,077,431,625	100	8,478,653,290	100	8,896,435,375
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	persen	100	100	7,498,087,000	100	7,700,839,500	100	8,077,431,625	100	8,478,653,290	100	8,896,435,375
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	persen	100	100	7,270,087,000	100	7,451,839,500	100	7,824,431,625	100	8,215,653,290	100	8,623,435,375
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	persen	100	100	225,000,000	100	245,000,000	100	250,000,000	100	260,000,000	100	270,000,000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	dokumen	1	1	1,500,000	1	2,000,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1	1	1,500,000	1	2,000,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :





## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pangan dan pertanian dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2021-2026. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Permasalahan mengenai penanggulangan bencana sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.



Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengurangan resiko bencana secara optimal dan terpadu.

Semoga Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021 - 2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.